

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH DESA DALAM Penguatan BUMDes SADANIOGA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

Oleh:

Piki Darma Kristian Pardede ¹⁾

Feliks Buulolo ²⁾

Arinus Zai ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

Pikipardede16@gmail.com ¹⁾

Feliks.biuulolo150600@gmail.com ²⁾

arinuszai@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the condition and application of the principles of good governance of the village government in strengthening the BUMDes of Sadanioga Village in Bertah Village, Tiga Panah District, Karo Regency. The place of this research is in BUMDes Sadanioga. While this type of research uses qualitative research methods using observations and interviews and field documentation. The number of informants in this study is 9 (nine) people who will be interviewed. The results in this study are the application of the principle of strengthening the BUMDes Sadanioga using the application of the strengthening principle, namely the application of the principle of strengthening participation, the application of the principle of strengthening the law, the application of the principle of strengthening transparency, the application of the principle of strengthening responsiveness, the application of the principle of strengthening the orientation of the agreement, the application of the principle of strengthening justice, the application of the principle Strengthening effectiveness and efficiency, Application of Principles of Strengthening Accountability, and Application of Principles of Strengthening strategic vision.

Keywords: Implementation, BUMDes, Strengthening

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Desa Dalam Penguatan BUMDes Sadanioga Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Adapun tempat penelitian ini berada di BUMDes Sadanioga. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi lapangan. Jumlah informan di dalam penelitian ini yaitu 9 (sembilan) orang yang akan di wawancarai. Hasil dalam penelitian ini yaitu Penerapan Prinsip Penguatan BUMDes Sadanioga menggunakan Penerapan berupa Prinsip Penguatan yaitu Penerapan Prinsip Penguatan Partisipasi, Penerapan Prinsip Penguatan Hukum, Penerapan Prinsip Penguatan Transparansi, Penerapan Prinsip Penguatan daya tanggap, Penerapan Prinsip Penguatan berorientasi perjanjian, Penerapan Prinsip Penguatan keadilan, Penerapan Prinsip Penguatan efektifitas dan efisiensi, Penerapan Prinsip Penguatan akuntabilitas, dan Penerapan Prinsip Penguatan visi strategi.

Kata Kunci: Penerapan, BUMDes, Penguatan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tugas yaitu untuk mencaai dalam suatu tujuan negara atau nasional, maka oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup di dalamnya melaksanakan setiap tugas dan fungsi pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Pemerintah memiliki dalam memberi ruang yang sangat cukup luas untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pemerintah bertugas memenuhi kepentingan masyarakat dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti pembangunan, pembiasaan serta pemberdayaan masyarakat guna untuk mencapai tujuan di dalam suatu Negara Indonesia. Dengan berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, di dalam alinea 4 (ke empat) secara jelas menyatakan bahwa tugas umum Pemerintah Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Good Governance sangat berkaitan didalam aparat birokrasi yang bertanggung jawab adalah masalah-masalah yang terlihat di negara saat ini. Menurut Thoha (2004 : 61, Tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance* merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara Reguller dalam ilmu politik dan administrasi publik. Di Dalam *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik bisa menghasilkan birokrasi yang manbaik dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelanan yang baik kepada masyarakat itu sendiri.

Di dalam pemerintahan desa memiliki peranan dalam melaksanakan *good governance* adalah elaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan keawajiban yang dimiliki pemerintah desa. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penguatan pemerintahan desa termasuk di dala peranan *good governance*. Di dalam membangun *good governance*, di era reformasi sekarang ini menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadannya dan mutlak terpenuhi.

Tahapan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes,

dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes. Anggaran dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. (idfos.or.id/penguatan dan pengembangan bumdes di Akses 27 Mei 2022).

Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembangaan ekonomi yang penguatan sepenuhnya oleh masyarakat desa. Implikasi dari otonomi desa salah satunya yaitu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa. Bentuk kelembangaan tersebut dinamakan Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa : Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha

Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Pemerinth, baik pusat maupun daerah itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga Usaha Desa yang penguatan oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentu berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Di dalam tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa suai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (PKDSP, 2007 hal. 4-5). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam penguatannya masih terkendala oleh: (1) belum tersedianya tenaga profesional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tingkat desa; (2) belum tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti belum tersedianya Pasar Desa; dan (3) masyarakat masih belum terbiasa dengan pola transaksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana adanya iuran anggota dan simpanan anggota yang masih belum terbiasa dilakukan di sejumlah desa (Komite I, 2015). Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa menetapkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertip penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Untuk mencapai asas tersebut, dengan kucuran Dana Desa yang dilokasikan pemerintah pusat langsung ke Desa, Desa dituntut mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dituntut pula unsur

kehati-hatian dalam mengelola unit usahanya. Apabila penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersumber dari uang kas Negara dan Wajib dipertanggung jawabkan.

Ini merupakan tanggung jawab pengelola dan pihak desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengalami kebangkrutan atau pailit menandakan bahwa sebuah organisasi atau struktur organisasi dalam pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan kuat. Masalah yang muncul bisa jadi malah rugi dan bangrut dan pailit.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyatakan (1) Kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi beban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa, (3) Unit Usaha Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan Perundang-Undangan mengenai kepailitan.

Tigapanah merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan Tigapanah terletak pada 1.192-1.376 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Tigapanah memiliki luas 186.84 Km² yang terdiri dari 26 (dua puluh enam)desa. Wilayah Kecamatan Tigapanah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dolat Rakyat dan Berastagi, di sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Merek, Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Juhar, Munte, dan Kabanjahe, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Brusjahe dan Merek.

Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo merupakan salah satu desa laporan pelaksanaan pembangunan baik karena sering berada di lima (5) besar dari dua puluh enam (26) urutan desa terbaik di Kecamatan Tigapanah (Kecamatan Tigapanah Dalam Angka 2021). Memiliki 190 KK dengan kondisi masyarakat yang hidup bercocok tanam dan mengelola masih datu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal pupuk dan pestisida. Namun beberapa potensi desa lainnya masih belum maksimal karena

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan lainnya yaitu masyarakat ada bon (mengutang). Sulit pembukuan, gaji tiap bulan belum ada, belum ada sangsi, utang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini di berastagi sebagai wawancara pada survei awal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa akan memiliki kesan kuat yang terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Dsea adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembangaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti membuat sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Dsa Dalam Penguatan BUMDes Sadanioga Di Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Good Governance

Sumarto (2009:13 “ merupakan praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat (Ramadana et al 2013).

Desa

Menurut Indrizal (2016) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai : “suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

3. METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa

Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Adapun waktu penelitian ini yaitu Apri-Juni 2022

Metode Penelitian

Daam suatu penelitian diperlukan teknik untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang dilaksanakan pada observadi terhadap gejala, kasus dan kondisi aktual dimasa sekarang

Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 9 (sembilan) informasi yang dianggap mampu layak dan dapat memberikan informasi yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes dan Masyarakat sebanyak tiga orang.

Teknik Analisis Data

Menurut Nsution (2002: 126), Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola. Tema atau kategori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Penguatan BUMDes Sadanioga

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Hubungan ami sangat Baik dan komunikasi untuk partisipasi sangat baik, agar BUMDes yang di kelola berjalan dengan lancar	<p>Keterlibatan BUMDes terhadap pengelolaan potensi ekonomi desa sangat bermanfaat.</p> 
Sekretaris Desa Bertha	Menurut saya masyarakat sangat terbantu dalam subsidi pupuk dan bibit tanaman setelah adanya BUMDes di Desa Bertah	
Badan Permusyawaratan Dsea	Setelah adanya BUMDes perekonomian masyarakat di Desa Bertah sangat terbantu	
Ketua Bendahara Sadanioga	Baik saling bekerja sama juga, tapi disini anggota BUMDesnya Surat Kerjasama ada 6 orang kerja yang lebih sering aktif itu hanya tiga orang. Tapi komunikasinya lancar terhadap sesama anggota BUMDes hanya saja mereka tidak terlalu aktif dalam penguatan BUMDES mungkin sibuk dengan ladang masing-masing.	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Dengan adanya pupuk dan bibit tanaman masyarakat sangat senang karena mereka tidak kewalahan untuk membeli pupuk	
Bendahara BUMDes Sadanioga	BUMDes ini gunanya untuk membantu masyarakat dalam permasalahan pupuk untuk itu sangat menunjang pendapatan ekonomi masyarakat	
Masyarakat Desa Bertah	Dengan adanya BUMDes ini kami sangat terbantu dalam pasokan pupuk dan bibit tanaman sehingga menunjang penghasilan masyarakat	
Masyarakat Desa Bertah	Peran BUMDes terhadap masyarakat sangat berpengaruh didalam pengembangan sektor pertanian	
Masyarakat Desa Bertah	Penguatan BUMDes yang bagus dan baik, menjadikan BUMDES yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penguatan BUMDes selalu dari sana dan masuk masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pelanggan kritik harga pupuk kemahalan., untuk saran agar yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang mereka belanjakan	

Penerapan Prinsip Pengutan Aturan

Hukum

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Setiap menjalankan Program BUMDes harus berperan sesuai dengan peran mereka masing-masing.	
Sekretaris Desa Bertah	Didalam menjalankan Program-program BUMDes harus ada keterlibatan pengawas	

Badan Permusyawaratan Desa	Semua aktivitas BUMDes kita pantau sehingga tidak ada yang melanggar aturan yang berlaku	Semua peraturan sudah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku 
Ketua BUMDes Sadanioga	Kami bekerja sesuai dengan bidang tersendiri tanpa mengurangi kerja sama penguatan tim	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Tidak ada yang merugikan masyarakat	
Bendahara BUMDes Sadanioga	Penguatan yang dilakukan seperti bendahara tugasnya adalah keuangan	
Masyarakat Desa Bertah	Iya, Sudah sesuai peraturan yang berlaku	
Masyarakat Desa Bertah	Ya mereka menjalankan sudah sesuai dengan hukum	
Masyarakat Desa Bertah	Iya sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan hanya menagih masyarakat yang ada hutang. Penting sebab agar masyarakat maupun pengurusnya tidak esuk-sukanya dalam penguatan BUMDes dan harus taat pada aturan yang berlaku	

Penerapan Prinsip Penguatan Transparansi

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Sebenarnya sih ada yang mengurus di bidang media kita sudah ada di <i>website</i>	Proses penyusunan BUMDes Sadanioga berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku dan terbuka 
Sekretaris Desa Bertah	Untuk pembelian laporan pupuk sudah terbuka	
Badan Permusyawaratan Desa	Ya terlebih dahulu kami mensosialisasikannya kepada masyarakat	
Ketua BUMDes Sadanioga	Ya di dalam menjalankan unui-unit usaha BUMDes jumlah anggota BUMDesnya ada 6 orang namun yang selalu berpartisipasi dalam penguatan BUMdes hanya 3 orang	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Ya Jika rapat rutin pengurus itu tiap bulan ada kita buat, bisa sebulan dua kali ataupun sebulan satu kali, ya tergantung kepentingan sih ya dan sifatnya itu normal	
Bendahara BUMDes Sadanioga	Penguatan nya seperti bendahara tugasnya masalah keuangan	
Masyarakat Desa Bertah	Masyarakat yang mampu terhadap ketua dan anggota aja yang menjadi kebutuhan mereka. Bagus menjadikan apa yang menjadi fungsi obat-obatan tersebut	
Masyarakat	Adapun Kepercayaan masyarakat terhadap	

Desa Bertah	ketua atau anggota BUMDes percaya total sebab pendekatan dalam penguatan BUMDes jelas dan transparansi	
Masyarakat Desa Bertah	Proses penyusunan penguatan BUMDes Sadanioga berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku dan terbuka	

Penerapan Prinsip Penguatan Daya Tangkap

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Selain itu, kan kita juga punya kotak saran (Kotak Aspirasi)	<p>Penguatan Daya Tangkap pengurus setiap selalu sigap</p> 
Sekretaris Desa Bertah	Ya, tapi kalau bisa masyarakat datang saja langsung saja ngomong gitu. Sekalian ngobrolkan ya itu kan lebih efektif. Kita juga bisa langsung dengar langsung	
Badan Permusyawaratan Desa	BUMDes ini juga ada karena masukan masyarakat jadi kita kan harus mendengarkan keluhan mereka	
Ketua BUMDes Sadanioga	Ya kalau aspirasi itu pasti kita selalu menerima kita terbuka	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Tapi masukan dari masyarakat selalu kita usahakan. Bagaimanapun kan itu sudah kayak amanah gitu	
Bendahara BUMDes Sadanioga	Ya kalau untuk aspirasi pembentukan program penguatan BUMDes baru itu biasanya agak lama karena harus di rapatkan terlebih dahulu, dibicarakan modalnya berapa, berapa tempatnya dimana, dan lain-lainnya.	
Masyarakat Desa Bertah	Tindak lanjut yang cepat walaupun terkadang masyarakat ingin membeli produk lainnya	
Masyarakat Desa Bertah	Ya bagus karena ada layanan pengaduan kotak saran dan bisa langsung ke Kepala Desa	
Masyarakat Desa Bertah	Layanan pengaduan terhadap prosedur atau pestesida yang telah dibeli oleh masyarakat langsung ke pada BUMDes	

Penerapan Prinsip Penguatan Berorientasi Perjanjian

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Kami disini lebih mencari penguatan yang memang dia dalam segi kemampuan di dalam bidangnya	Bahwa masih rendahnya tingkat berorientasi perjanjian unit usaha BUMDEs tersebut karena masih dianggapnya aturan sebagai hal yang sepele
Sekretaris Desa Bertah	Ya gak harus warga sini	
Badan Permusyaratan Desa	Ya seperti yang sudah saya katakan bendahara kami saja harus yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi ataupun yang mengerti tentang pelaporan	
Ketua BUMDes Sadanioga	Untuk penguatan yang ada BUMDes Sadanioga ini ada kita angkat dari warga	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Sebenarnya ada yang pendamping BUMDes yang resmi, akan tetapi disini malah pendamping seperti koordinator yang berasal dari luar desa ini	
Bendahara BUMDes Sadanioga	Ya sebetulnya pendamping tidak boleh BUMDes, akan tetapi karena penguatan sudah saling percaya ya kita sudah percaya	
Masyarakat Desa Bertah	Memberian kesempatan untuk kepada setiap oknum yang terlibat gar tidak menjadi masalah lagi	
Masyarakat Desa Bertah	Apabila ada penguasaan yang baik maka ada manajemen yang baik	
Masyarakat Desa Bertah	Pemimpin bertindak sebagai ppenegah hak kepada masyarakat walaupun kepada anggota BUMDesnya serta memberi penjelasan pemahaman kepada masing-masing yang terlibat	



Penerapan Prinsip Penguatan Keadilan

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Dalam pengambilan keputusan selalu kami dilibatkan supaya rasa adil itu ada	
Sekretaris Desa Bertah	Untuk menciptakan rasa yang adil kita selalu bermusyawarah dengan pihak BUMDes	

	Sadanioga	<p>Dengan menunjang rasa keadilan maka kami mengadakan rapat musyawarah</p> 
Badan Permusyawaratan Desa	Ya kami bermusyawarah	
Ketua BUMDes Sadanioga	Guna untuk penguatan keadilan ya kita harus sosialisasi	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Ya siapa ada keadilan kita selalu bermusyawarah	
Bendahara BUMDes Sadanioga	Kami juga mengadakan musyawarah	
Masyarakat Desa Bertah	Pemerintah Desa sudah meningkatkan kualitas hidup dengan membuka BUMDes	
Masyarakat Desa Bertah	Dengan dibentuknya BUMDes Masyarakat merasa adil untuk mendapatkan pupuk	
Masyarakat Desa Bertah	Keberadaan BUMDes sangat adil sehingga untuk mendapatkan pupuk kami tidak susah	

Penerapan Prinsip Penguatan Efektifitas dan Efisiensi

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Dengan adanya administrasi yang jelas tidak ada yang tumpang tindih dalam menjalankan tugas	<p>Jadi efektifitas dan</p>
Sekretaris Desa Bertah	Terlaksananya administrasi penyelenggaraan penguatan BUMDes Sadanioga yaitu mencatat di administrasi pembukuan	
Badan Permusyawaratan Desa	Perbaikan berkelanjutan dalam penguatan BUMDes yaitu harus dicatat semua efektifitas dan efisiensi guna untuk memperlancar administrasi	
Ketua BUMDes Sadanioga	Bagus, namun pasti ada masalah yang ada dalam pembukuan. Contohnya ada masyarakat yang berutang namun pada saat kita pembukuan uatangnya tak terbayarkan semua	
Sekretaris BUMDes	Didalam pencatatan entah itu seper empat dari utang sisa yang mau dibayar, jadi untuk	

Sadanioga	melakukan pembukuan jadinya sulit	efesinsi merupakan prinsip yang mendasar dari Good Governance maka ditetapkan sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam menjalankan BUMDes
Bendahara BUMDes Sadanioga	ya kita harus benar efektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan tugas dalam penguatan BUMDes ini	
Masyarakat Desa Bertah	Terlaksananya administrasi yaitu dengan adanya pembukuan yang jelas	
Masyarakat Desa Bertah	Perbaikan berkelanjutan dalam penguatan BUMDes ya dengan adanya catatan yang efektif dan efesien dari BUMDes	
Masyarakat Desa Bertah	Dengan adanya administrasi yang jelas sehingga tidak ada yang tiumpang tindih dalam penguatan BUMDes (Kristina Br Karo Sekali)	



Penerapan Prinsip Penguatan Akuntabilitas

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Ketua, sekretaris dan Bendahara BUMdes Sadanioga memberi laporan keuangan ke Pemerintah Desa	Jadi penguatan
Sekretaris Desa Bertah	Ya mengenai dalam pertanggung jawaban BUMDes Sadanioga	
Badan Permusyaratan Desa	Sekretaris mencatat dan memberikan jawaban BUMDes Sadanioga ke kantor pemerintah Desa	
Ketua BUMDes Sadanioga	Ya harus ada laporan pertanggung jawaban	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Ya kita tetap pantau	
Bendahara BUMDes	Kita tetap mencatatnya	

Sadanioga		akuntabilitas sangat berguna dalam penguatan BUMDes Sadanioga
Masyarakat Desa Bertah	Ya yang ada di BUMDes sudah melaporkan keuangan ke kepala desa	
Masyarakat Desa Bertah	BUMDes sudah memberikan laporan keuangan ke pihak Desa	
Masyarakat Desa Bertah	Pihak BUMDes sudah memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak pemerintah desa	

Penerapan Prinsip Penguatan Strategi

Informan	Hasil Wawancara	Pembahasan
Kepala Desa Bertah	Di dalam visi dan misi kita sudah ada. Karena itu visi misi ini salah satu patokan kita didalam menjelaskan BUMDes Sadanioga	penguatan visi strategi sangat berguna dalam penguatan BUMDes Sadanioga
Sekretaris Desa Bertah	Ya selain itu kita memperhatikan bagian tupoksi dalam menjalankan strategi	
Badan Permusyawaratan Desa	Visi strategi menjalankan BUMDes Sadanioga untuk tujuan program dalam penguatan BUMDes kantor Pemerintahan Desa	
Ketua BUMDes Sadanioga	BUMDes mempunyai strategi guna mengembangkan daerah tersebut	
Sekretaris BUMDes Sadanioga	Dibentuk strategi untuk penguatan BUMDes	
Bendahara BUMDes Sadanioga	Iya kita sudah menjalankan sesuai dengan visi strategi yang sudah diberikan Pemerintah Desa dalam penguatan BUMDes	
Masyarakat Desa Bertah	Ya dengan adanya visi strategi sangat mendukung BUMDes	
Masyarakat Desa Bertah	ya sudah jelas di dalam penguatan BUMDes	
Masyarakat Desa Bertah	Dukungan dari kepala Desa sudah sesuai untuk menwujudkan Visi Strategi	

--	--	--

5. SIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :

Penerapan prinsip penguatan partisipasi dalam tingkat kemanfaatan BUMDes Sadanioga sangat bermanfaat.

Penerapan Prinsip penguatan Aturan Hukum BUMDes Sadanioga sudah sesuai dengan peraturan Desa.

Penerapan Prinsip Penguatan sangat transparan dalam Mengelola BUMDes Sadanioga.

Penerapan prinsip penguatan Daya Tanggap Adanya tindakan Daya Tanggap yang BUMDes tersebut menghasilkan kinerja yang baik.

Penerapan prinsip penguatan berorientasi perjanjian masih dianggap sebagai aturan yang sepele

Penerapan prinsip Penguatan keadilan penerapan Prinsip Pnguatan BUMDes Sadanioga sudah sesuai

Penerapan Prinsip Penguatan Efektifitas dan Efisiensi merupakan merupakan prinsip yang mendasar dari Good Governace, maka di tetkan sebagai acuan pemerintah dala melaksanakan tugasnya dalam menjalankan BUMDes.

Penerapan Prinsip Penguatan Visi strategi di dalam keterlibatan

masyarakat dalam hal ini adalah penting karena masyarakat juga merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam program yang dilaksanakn oleh BUMDes Sadanioga.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ada dalam penguatan BUMDes Sadanioga Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Yaitu sumber Daya Manusia (SDM) dan Modal yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam mengelolah BUMDes Sadanioga masi minim.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dian Ratna Sari. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Dewi SYR, Meirinawati. 2013. Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa

- melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desasareng Kecamatan Geger Kabupaten Madium).
- Ibrahim. 2013. Pengaturan Dan Pembentukan BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi DI Kabupaten Lombok Timur). Lombok [Id]. Jurnal Universitas Mataram.
- Kooiman. Jan (ed). 1993. Modern Governance: New Goverbment Society Interactions. London: sage Publications
- Lucya Giska Putri. 2020. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Good Corporate Governance (Studi kasus : Bumdes,Sejahtera,Desa Bleberan, Kecamatan Playen kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2018. Skripsi Universitas Mhammadiyah Yogyakarta
- Muhammad Arnis. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan di Desa Pantan Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Ran Iry Banda Aceh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- PKDSP, 2007 Pengertian Tenan Badan Usaha Miik Desa (BUMDes)
- Ramadana CB, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguasa Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabuaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4, Hal 31-42.